

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia dalam rangka memilih calon pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat di setiap daerah. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sudah dimulai pada Tahun 2005 setelah adanya revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kembali direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom<sup>1</sup>. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung memperbesar harapan masyarakat untuk mendapatkan calon pemimpin yang aspiratif, cakap dan inovatif dalam meningkatkan pembangunan untuk kemajuan daerah. Berbicara mengenai kepemimpinan, berarti adanya suatu hubungan dan pengaruh antara pemimpin dengan yang dipimpin.

Pemimpin menurut Kartini Kartono adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian suatu atau beberapa tujuan.<sup>2</sup> Pemimpin memiliki pengaruh yang mampu memobilisasi atau menggerakkan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Sedangkan menurut pemimpin Hasibuan adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan.<sup>3</sup> Pemimpin merupakan sosok yang diharapkan mampu menjadi

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>2</sup>Kartini Kartono. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa. hlm. 18

<sup>3</sup>Hasibuan, Malayu Sayuti. 2011. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara. hlm 157

penyeimbang dan mediator bagi pencapaian sebuah tujuan. Pemimpin sebagai agen perubahan diharapkan mampu berfikir kritis menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan dalam mensukseskan kerangka pembangunan daerah.

Sementara itu kepemimpinan menurut Gardner merupakan suatu atau sekumpulan aktivitas yang teramati oleh pihak lain, berlangsung dalam kelompok, organisasi atau lembaga, melibatkan pemimpin dan pengikut, bekerjasama untuk mewujudkan tujuan umum yang direncanakan. Dalam melakukan kajian terkait dengan kepemimpinan perlu dilakukan sebuah perbandingan antara kepemimpinan yang bersifat struktural dengan kepemimpinan yang mengarah kepada kepemimpinan politik. Oleh karena itu penting ditegaskan kembali dalam penelitian ini, selain harus memahami pengertian tentang kepemimpinan, maka harus dipahami pula pengertian tentang kepemimpinan politik. Oleh karena itu, konsep kepemimpinan politik berbeda dengan konsep manajemen kepemimpinan dalam organisasi swasta maupun organisasi non formal lainnya yang tidak memperoleh legitimasi rakyat.

Kepemimpinan politik menurut Andrew Heywood dapat dipahami dalam tiga perspektif yaitu kepemimpinan sebagai pola perilaku, kepemimpinan sebagai kualitas personal, kepemimpinan sebagai nilai politik.<sup>4</sup> Kepemimpinan politik biasanya berlangsung di dalam suprastruktur dan infrastruktur politik atau dalam lembaga pemerintah, Partai Politik dan lembaga masyarakat. Oleh sebab itu, pemimpin politik berbeda dengan kepala instansi pemerintahan, karena pemimpin politik lebih menggunakan kewenangan dalam mempengaruhi bawahannya. Berbeda dengan kepala suatu instansi yang cenderung menggunakan hubungan formal dan interpersonal dalam menggerakkan bawahannya. Pemimpin politik lebih menggunakan hubungan-hubungan informal dan personal dalam menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Ramlan Surbakti. 1990. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo. hlm. 134

Orientasi kepemimpinan dalam lembaga pemerintahan lebih bersifat transparan dan demokratis yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sedangkan orientasi dalam manajemen kepemimpinan organisasi swasta lebih bersifat ekonomis untuk mencari keuntungan dengan melihat kondisi pasar dan selera masyarakat. Pemimpin pada organisasi swasta merancang visi dan strategi berdasarkan perhitungan pragmatis dan ekonomis. Berbeda dengan kepemimpinan politik, visi dan strategi dirancang seorang pemimpin berdasarkan pada tujuan politik itu sendiri.<sup>6</sup> Kepemimpinan politik berhubungan dengan aspek moral dan psikologis yang harus dikembangkan pelaku politik, terutama untuk merasakan kegelisahan sosial, menyusun kebijakan politik dan mengamankan setiap kebijakan politik dengan keberanian dan keteguhan sikap. Kepemimpinan politik merupakan salah satu kebutuhan politik utama yang harus dikembangkan dalam arus besar reformasi demokratis seperti sekarang ini.

Kepemimpinan sebagai pola perilaku terkait sekali dengan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mengupayakan tujuan yang diharapkan. Setiap pemimpin berusaha melakukan kegiatannya dengan menggunakan norma perilaku tertentu yang oleh para ahli disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya Kepemimpinan menurut Thoha adalah norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain seperti yang ia lihat.<sup>7</sup> Untuk mewujudkan dan melaksanakan peran dan tugasnya sebagai seorang pemimpin, kepala daerah diharuskan memiliki sikap, sifat serta gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi lingkungan birokrasi, pengikut serta situasi dan kondisi yang melingkupi lembaga pemerintahan yang dipimpinnya.

Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku atau gaya kepemimpinan yang berbeda dalam memimpin. Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku konsisten yang diterapkan pemimpin melalui orang lain, yaitu pola perilaku yang diperlihatkan pemimpin pada saat mempengaruhi orang lain,

---

<sup>6</sup>M. Alfian Alfian. 2016. *Wawasan Kepemimpinan Politik :Perbincangan Kepemimpinan Di Ranah Kekuasaan*. PT Penjuru Ilmu Sejati : Bekasi. hlm 18

<sup>7</sup>Miftah Thoha. 2003. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 15.

seperti yang dipersepsikan orang bukan pendapat pemimpin tentang perilakunya sendiri, tetapi bagaimana persepsi bawahan terhadap perilaku pemimpinnya. Gaya kepemimpinan merupakan perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya.<sup>8</sup> Gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerja, kualitas pelayanan dan pelaksanaan pelayanan yang akhirnya berdampak kepada nilai pelayanan atau terhadap kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik. Lalu, bagaimana jika melihat fenomena gaya kepemimpinan kepala daerah saat ini? Fenomena yang terjadi pada kepemimpinan kepala daerah pada saat ini, yang diisi oleh orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda dan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda pula.

Permasalahan serius yang terjadi saat ini adalah krisis kepemimpinan kepala daerah yang hampir melanda sebagian besar wilayah di Indonesia. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, tahun 2010 ada 206 kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Kemudian pada tahun 2011 Kemendagri mencatat sebanyak 40 kepala daerah mengalami masalah yang sama, sedangkan tahun 2012 ada 41 kepala daerah dan di tahun 2013 sebanyak 23 kepala daerah tersangkut masalah yang serupa. Berdasarkan pantauan ICW sebanyak 183 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2015. Total kepala daerah yang tersangkut masalah sebanyak 110 orang yang terdiri dari 34 orang walikota, wakil bupati sebanyak 16 orang, gubernur 14 orang, wakil walikota berjumlah 7 orang, dan wakil gubernur sebanyak 2 orang (<http://www.antikorupsi.org.id>, diakses 14 Maret 2017). Di berita berbeda, Kemendagri mencatat 77 kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT), dan 300 lebih kepala daerah terkena masalah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, 2012, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* Edisi Ketiga, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hlm.42

<sup>9</sup>Didik Gunawan Suharto, dkk. Pilkada Pollitik Dinasti dan Korupsi. Seminar Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan. *Konferensi Perkumpulan Dekan Ilmu-Ilmu Sosial PTN Se Indonesia*. hlm. 34

Menurut Burns krisis kepemimpinan ditandai dengan mengemukanya perilaku biasa-biasa saja atau tidak bertanggung jawab dari begitu banyak orang berkuasa, namun kepemimpinan jarang hadir memenuhinya.<sup>10</sup> Perilaku biasa-biasa saja yang ditampilkan seorang pemimpin politik umumnya disebabkan oleh ketidakpahaman dengan konsep kepemimpinan yang akan dijalankan sebagai kepala daerah, serta visi yang kurang jelas untuk membangun daerah. Sedangkan sikap yang tidak bertanggung jawab biasanya disebabkan oleh ketidakpedulian pemimpin terhadap rakyatnya dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau kepentingan golongan dibandingkan kepentingan pengikut. Akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri dan golongan yang ada dalam komunitasnya. Inilah yang memicu terjadinya tindakan korupsi dalam birokrasi yang semakin marak di Indonesia hingga saat ini. Fenomena tersebut menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah atau pemimpinnya sendiri yang seharusnya mereka harapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kepemimpinan kepala daerah merupakan ujung tombak dari pembangunan daerah, karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan kepala daerah pada saat ini banyak memberikan kekecewaan, tetapi tidak sedikit pula kepala daerah yang mampu memberikan perubahan positif dalam pembangunan untuk memajukan daerahnya. Dewasa ini, terdapat beberapa kepala daerah yang dianggap mampu memajukan atau merubah daerahnya ke arah yang lebih baik dan masuk kedalam kategori pemimpin berprestasi. Kepala daerah berprestasi akan melahirkan harapan publik terhadap pembangunan dan kemajuan di daerahnya. Menurut salah satu media massa lokal, Mahyeldi Ansharullah merupakan salah satu pemimpin yang cukup fenomenal khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Gaya kepemimpinan Mahyeldi sebagai Walikota Padang merupakan salah satu kepemimpinan yang menarik untuk dibahas, karena kepemimpinan politik Mahyeldi sebagai walikota pada periode 2014-2019 menampakkan gaya

---

<sup>10</sup>Burns dalam Alfian Alfian. Opcit. hlm. 84

kepemimpinan politiknya yang berbeda dengan kepemimpinan Walikota sebelumnya. Perbedaan masing-masing gaya kepemimpinan politik tersebut sangat tergantung pada kekhasan dari masing-masing kepribadian dan perilaku unik dari masing-masing pemimpin tersebut. Mahyeldi yang pernah menjabat sebagai Wakil Walikota periode pemerintahan sebelumnya dan terpilih menjadi Walikota setelah menggantikan Fauzi Bahar pada Pilkada tahun 2013 dan dalam masa periode kepemimpinannya saat ini Kota Padang dinilai telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam pembangunan tata kota serta tata kelola pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan ataupun prestasi yang telah diperoleh Kota Padang, sebagaimana yang dapat dilihat pada table berikut :<sup>11</sup>

**Tabel 1.1 : Penghargaan/Prestasi yang Dicapai Kota Padang Masa Kepemimpinan Mahyeldi Ansharullah**

No	PENGHARGAAN/PRESTASI
1	Penghargaan Terbaik Nasional Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2014, 2015 dan 2016
2	Penghargaan sebagai Kota Penggerak Koperasi Terbaik Se-Indonesia dari Menteri Koperasi dan UMKM Tahun 2014
3	Penghargaan sebagai Kota Berbasis Agro Ekonomi memiliki 181 wirausaha di bidang agro yang dibina dan diberi bantuan modal serta bibit tanaman dari Gubernur Sumatera Barat tahun 2015
4	Penghargaan Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri Nasional Sekolah di Kota Padang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2014, 2015 dan 2016
5	Di bidang Keuangan, Padang meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang
6	Penghargaan Kota Potensial Pariwisata Terbaik predikat Platinum dan termasuk Kota terbaik Pelayanan Publik peringkat delapan terbaik tahun 2015 dan 2016

<sup>11</sup>Syamdani dkk, 2017, *Mahyeldi : Memimpin Adalah Melayani*, Jakarta: TERAS, hlm. 269-302.

7	Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden RI atas dedikasi mengembangkan koperasi di Kota Padang
8	Sukses menyelenggarakan pertemuan Indonesia-IOLGF di Padang, Tuan Rumah Konferensi Tingkat Tinggi Menteri Luar Negeri Negara-Negara IORA (Indian Ocean Rim Association) Tahun 2015
9	Penghargaan prestisius dan paling bergengsi yakni Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) dari menteri perhubungan RI Tahun 2015, 2016 dan 2017
10	Peringkat I Apresiasi Pendidikan Islam Kategori Kepala Daerah Peduli Pendidikan Islam dari Menteri Agama RI Tahun 2015
11	Satu-satunya Kota di Indonesia menerima Anugerah Peduli Pendidikan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2015
12	Penghargaan Pemerintah Daerah Peduli Hak Asasi Manusia dari Menteri Hukum dan HAM RI Tahun 2015
13	Penghargaan ASITA Award dari Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Sumatera Barat 2016. (Keberhasilan Kota Padang menata Pantai Padang)
14	Sukses sebagai tempat penyelenggaraan event internasional Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) atau Latihan Bersama TNI Angkatan Laut dengan banyak tentara dari 35 negara sahabat April 2016
15	Sukses sebagai tempat penyelenggaraan event internasional 15th Westren Pacific Naval Symposium (WPNS) April 2016
16	Sukses sebagai tempat penyelenggaraan event internasional The International Fleet Review (IFR) April 2016
17	Penghargaan Government Award 2016 dari Majalah Sindo Weekly pada April 2016 karena berhasil menata kota dalam waktu yang terbilang cepat
18	Penghargaan Penegakan Perda dan Penertiban Tanpa Kekerasan dari Gubernur Sumatera Barat Tahun 2016
19	Penghargaan Padang Marketing Champion 2016 di bidang Government dan Best Of the Best Markeeters Of The Year Padang 2016 untuk Walikota Padang Mahyeldi Dt Marajo dari Majalah MarkPlus, Inc pada event Indonesia Marketeers Festival 2016
20	Penghargaan The 1st Sumatera PR INDONESIA Media Relations Award & Summit (SUMPRIMAS) untuk kategori Kota di Sumatera yang terbanyak diberitakan di media nasional dari Majalah PR INDONESIA Mei 2016
21	Penghargaan BKN Award 2016 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) kategori Implementasi CAT dalam Manajemen ASN
22	Penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik Kabupaten/Kota di Sumatera dari Presiden RI Tahun 2016

23	Sukses pembebasan lahan Jalur 40 Jalan Padang By Pass dari bangunan liar pada Juli 2016
24	Penghargaan Manggala Karya Kencana kepada Walikota Padang karena dinilai memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana serta pembangunan keluarga sejahtera di daerahnya Tahun 2016
25	Penghargaan Kota Terbaik Platinum untuk Koridor Sumatera Bagian Barat dan Tengah dari Majalah Tempo dalam ajang Indonesia's Attractiveness Award (IAA) 2016
26	Penghargaan Kota Potensial Investasi dan Kota Potensial Pariwisata, infrastruktur, dan pelayanan publik dari Majalah Tempo dalam ajang Indonesia's Attractiveness Award (IAA) Tahun 2016 dan 2017
27	Sukses menjadikan Jalan Permindo sebagai Kawasan Ramah Disabilitas pertama di Sumatera Barat pada September 2016
28	Penghargaan Kawastara Pawitra dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas Komitmen Walikota Padang dalam mengimplementasikan Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 secara berkelanjutan
29	Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Sumatera Barat 2016
30	Sukses sebagai tuan rumah event nasional Konferensi dan Pameran Pembangunan tentang Kota Sehat di Indonesia dengan tajuk Indonesia Healty City Conference & Expo (IHCC) 2016
31	Penghargaan National Procurement Award 2016 atas pemenuhan Standar Tertinggi oleh LPSE Kota Padang dari Kepala LKPP
32	Juara Umum Porprov XIV Sumatera Barat Tahun 2016 di Kota Padang
33	Penghargaan Indonesia Road Safety Awards (IRSA) 2016 dari Adira Insurance. Penghargaan ini diterima Kota Padang terkait penerapan program-program keselamatan di jalan raya.
34	Sukses sebagai tuan rumah penyelenggaraan event internasional Malindo Festival Ekonomi dan Budaya yang diikuti oleh beberapa negara-negara tetangga Tahun 2016
35	Penghargaan Kota Langit Biru Kategori Kota Besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 atas Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) dan Green Transportation.
36	Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombusman RI Tahun 2016
37	Penghargaan Anugerah Dana Rakca 2016 dari Kementerian Keuangan RI.

38	Sukses sebagai tempat penyelenggaraan event Peringatan Hari Bela Negara ke-68 Tingkat Nasional Tahun 2016.
39	7 Kepala Daerah Terpopuler 2016 versi Indonesia Indikator untuk Walikota Padang Mahyeldi Dt. Marajo
40	Penghargaan kota terbaik kategori maritim versi majalah SINDO Weekly Tahun 2017
41	Sebagai Daerah yang memiliki Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017 terbaik pertama kategori kota di Sumatera Barat
42	Penghargaan “Pastika Parahita” dari Menteri Kesehatan RI atas komitmen Pemerintah Kota Padang dalam melindungi generasi muda dari bahaya rokok, terlaksananya Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Padang Tahun 2017
43	Penghargaan Kota Layak Anak Tahun 2017
44	Penghargaan Piala Adipura kategori kota besar Tahun 2017
45	Penghargaan Best Communicators 2017, penghargaan kepada pemimpin negara, wilayah, dan korporasi yang memiliki ekspour tinggi dan memiliki pasion berkomunikasi yang tinggi ditengah masyarakat yang dipimpinnya
46	Penghargaan “Lencana Emas Bhakti Tani Nelayan Andalan 2017” dengan misi Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya memberikan perhatian yang besar kepada petani dan nelayan di Padang
47	Penghargaan IIPG ( Indonesian Institute for Governance) sebagai Pemerintah Daerah dengan kinerja dan tata kelola yang baik tahun 2017
48	Penghargaan “Swasti Saba Wistara” Predikat Kota Sehat Tahun 2017 merupaka penghargaan tertinggi untuk Kabupaten dan Kota yang memenuhi kriteria 9 tatanan sesuai potensi daerahnya.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas, maka dapat dilihat daftar prestasi yang telah diperoleh Kota Padang pada masa kepemimpinan Mahyeldi Ansharullah sebagai Walikota periode 2014-2019. Salah satu prestasi yang juga diraih oleh Pemerintah Kota Padang baru-baru ini dalam penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-AKIP) bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah I pada tanggal 25 Januari 2018 lalu adalah menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) atas kesuksesan meraih prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 dengan predikat nilai "BB" atau kategori sangat baik.<sup>12</sup> Prestasi dan penghargaan yang telah diraih Kota Padang pada masa kepemimpinan Mahyeldi Ansharullah selama kurun waktu satu periode pemerintahannya menunjukkan bukti keseriusan Walikota dalam memajukan Kota Padang dengan memberikan motivasi dan menanamkan semangat kerja yang tinggi kepada bawahannya di Pemerintahan agar dapat menjalankan program-program yang telah direncanakan untuk kemajuan Kota Padang yang telah dapat dicapai yang dibuktikan dengan perubahan tata Kota Padang yang cukup signifikan, namun disamping itu juga sebagian orang menilai bahwa kemajuan Kota Padang tidaklah disebabkan oleh kepemimpinan Walikota saja, namun juga berkat peran dari Wakil Walikota dan juga melanjutkan program-program pemerintah sebelumnya untuk menata Kota Padang dan melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih maju.

Mahyeldi sebagai Walikota Padang dianggap sebagai sosok pemimpin yang islami dan rendah hati serta gaya kepemimpinannya yang merakyat. Seluruh agenda pembangunan yang telah direncanakan pemerintah Kota Padang tidak akan berjalan dengan optimal tanpa adanya dukungan dari masyarakat, misalnya saja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Pantai Padang yang membujur dari jembatan Siti Nurbaya hingga belakang Pangeran Beach Hotel. setiap adanya kegiatan penataan yang dilakukan pemerintah daerah, cenderung mendapat penolakan dari penduduk setempat, hingga tak jarang terjadi tindakan-tindakan anarkis antara masyarakat dengan aparat keamanan. Namun di Kota Padang, kegiatan penataan dan relokasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi berjalan aman dan lancar.<sup>13</sup> Fenomena ini tentu tidak lepas dari peranan seorang pemimpin dalam memberikan perintah kepada bawahannya untuk melakukan

---

<sup>12</sup><http://www.pasbana.com/2018/01/lhe-akip-2017-pemko-padang-sukses-raih.html> (online) diakses tanggal 2 februari 2018 pkl. 14.10 WIB

<sup>13</sup><https://indonesiana.tempo.co/read/76932/2016/06/06/jefrihidayat84/login> (online) diakses tanggal 25 Desember 2017 pkl. 13.45 wib

proses eksekusi dengan baik tanpa menimbulkan aksi protes dari masyarakat yang dapat memicu terjadinya konflik, sehingga merugikan pemerintah dan rakyatnya sendiri.

Era Otonomi Daerah saat ini memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, maka dari itu kedudukan kepala daerah sangatlah strategis. Hal tersebut terkait dengan pembahasan kepemimpinan politik seorang kepala daerah Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah yang mengusung moto “memimpin adalah melayani” yang merupakan konsep dari kepemimpinan melayani. Menurut Greenleaf Kepemimpinan melayani (*servant leadership*) adalah suatu kepemimpinan yang berawal dari perasaan tulus yang timbul dari dalam hati dan berkehendak untuk melayani yaitu untuk menjadi pihak pertama yang melayani.<sup>14</sup> Esensi dasar dari kepemimpinan melayani adalah melayani orang lain yaitu pelayan kepada karyawan, pelanggan, dan masyarakat sebagai prioritas utama dan yang pertama. Kepemimpinan melayani akan memberikan perubahan secara menyeluruh pada kehidupan personal dan profesional pekerja serta masyarakat.

Banyak pihak yang menilai, keberhasilan Mahyeldi dalam melaksanakan kepemimpinannya di Kota Padang, tidak terlepas dari gaya blusukan yang dia lakukan.<sup>15</sup> Dari fenomena ini dapat diasumsikan bahwa Mahyeldi menerapkan konsep kepemimpinan melayani. Mahyeldi sebagai pemimpin juga dinilai mampu membimbing bawahannya untuk menyatukan visi dengan cara memotivasi, agar dapat bekerja secara efektif dan inovatif untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Upaya memberikan motivasi dan menggali potensi anggota merupakan proses transformasi nilai yang dilakukan seorang pemimpin kepada bawahannya agar dapat bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di

---

<sup>14</sup>Greenleaf dalam Idi Jahidi dan Moch. Hafid. Transformasional Leadership Dan Servant Leadership : Tantangan Kepemimpinan Dalam Menghadapi Era Global. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 3 No. 2 ISSN 2442–5958 E-ISSN 2540-8674. hlm. 220

<sup>15</sup><http://www.bentengsumbar.com/2016/05/beda-gaya-blusukan-jokowi-dan-mahyeldi.html> diakses pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 16:00 WIB

dalam organisasi. Dari penjelasan ini peneliti juga berasumsi bahwa Mahyeldi menerapkan gaya kepemimpinan transformasional. Menurut Burns Kepemimpinan transformasional merupakan proses dimana orang terlibat dengan orang lain, dan menciptakan hubungan yang meningkatkan motivasi dan moralitas dalam diri pemimpin dan pengikut serta mencoba membantu pengikut mencapai potensi terbaik mereka.<sup>16</sup> Proses transformasi nilai dan motivasi yang diberikan Mahyeldi kepada bawahannya dilakukan melalui dakwah kepada seluruh pegawai dalam instansi Pemerintah Kota Padang hal itu dikarenakan latar belakang Mahyeldi sebagai seorang pendakwah.

Dalam pengamatan, peneliti melihat adanya kemiripan Gaya kepemimpinan yang digunakan Mahyeldi dengan kedua gaya kepemimpinan dari konsep kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan melayani. Tujuan utama dari kedua konsep kepemimpinan ini yaitu untuk memicu pertumbuhan anggota organisasi, mengembangkan dan melibatkan seluruh anggota dalam mencapai visi organisasi secara optimal, melalui motivasi dan stimulasi yang diberikan oleh pemimpin kepada bawahannya. Dalam kepemimpinan transformasional, pengikut yang termotivasi akan memberikan hasil yang lebih baik dan seluruh motivasi yang diberikan diharapkan mampu melebihi ekspektasi yang dimiliki. Sementara itu, pada kepemimpinan melayani seorang pemimpin memberikan semangat dan memperhatikan sebagai mediasi yang memberikan pengaruh terhadap kinerja. Penelitian ini mengkombinasikan antara dua teori yang berbeda yaitu teori kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan melayani, karena menurut peneliti kedua teori ini memiliki hubungan dan proses yang hampir sama dalam mewujudkan visi organisasi. Gaya kepemimpinan transformasional pada dasarnya dapat diamati melalui perilaku yang membuat seorang pemimpin dikagumi serta menunjukkan keyakinan dan daya tarik pada pengikutnya, sehingga terjadi ikatan emosional dengan pengikut. Hal ini sejalan dengan kepemimpinan melayani yang menunjukkan sikap seorang pemimpin

---

<sup>16</sup> Peter G Northouse, 2013, *Kepemimpinan: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT.Indeks, hlm.176.

sebagai teladan bagi bawahan dalam melaksanakan setiap program kerja dan kebijakan yang akan direalisasikan dalam lingkungan birokrasi.

Dengan mengkombinasikan kedua teori ini, maka nantinya akan memunculkan sebuah konsep gaya kepemimpinan yang ideal yaitu gaya kepemimpinan transformasional melayani yang diharapkan mampu menjadi sebuah konsep kepemimpinan yang bisa diterapkan kepala daerah di Indonesia, terutama Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Penerapan gaya kepemimpinan yang tepat dalam menjalankan roda pemerintahan disebuah daerah akan memberikan perubahan dan kemajuan bagi daerah tersebut, sehingga akan jadi panutan oleh pemimpin atau pejabat di daerah lain.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kepemimpinan kepala daerah dalam era otonomi daerah merupakan suatu kepemimpinan yang sangat menarik perhatian publik, dimana seorang kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum dengan tujuan mendekatkan sosok pemimpin kepada masyarakat untuk kemajuan dan peningkatan pembangunan daerah. Kesuksesan Pilkada langsung bukan dinilai dari keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara demokratis untuk menciptakan sosok kepala daerah yang baru. Namun keberhasilan selanjutnya adalah bagaimana melahirkan sosok kepala daerah yang memiliki pola kepemimpinan yang efektif dan nantinya akan berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan.

Kepemimpinan kepala daerah sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan dan pembangunan suatu daerah di Indonesia. Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh kepala daerah adalah tanggap terhadap kondisi politik, baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat, serta tanggap terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat. Menurut Kaloh kepala daerah adalah orang yang bergerak lebih awal atau memelopori, mengarahkan pikiran dan pendapat anggota organisasi, membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya, menetapkan tujuan organisasi, memotivasi anggota organisasi agar

sesuai dengan tujuan organisasi dan harus dapat mempengaruhi sekaligus melakukan pengawasan atas pikiran, perasaan, dan tingkah laku aparatur pemerintahan yang ia pimpin.<sup>17</sup>

Undang-Undang tentang otonomi daerah yang berlaku saat ini memberikan peluang kepada kepala daerah untuk menjadi raja kecil di daerahnya masing-masing dalam menjalankan dan menggunakan kekuasaannya sebagai pemimpin secara otoriter. Gaya kepemimpinan Wakil Walikota yang pernah dijabat oleh Mahyeldi sebelumnya tentu saja berbeda dengan gaya kepemimpinan saat menjadi Walikota saat ini, karena wewenang yang lebih tinggi serta tanggung jawab yang lebih tinggi pula. Wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh kepala daerah menunjukkan ciri khas dari seorang kepala daerah untuk menentukan sikap, karakter, strategi, kreatifitas, dan inovasi sehingga akan membentuk gaya kepemimpinan.

Dalam penelitian ini untuk menganalisis gaya kepemimpinan politik Mahyeldi dengan menggunakan teori kepemimpinan melayani, karena bertolak dari moto “memimpin adalah melayani” yang diusung Mahyeldi dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai Walikota Padang. Indikasi Mahyeldi menerapkan konsep kepemimpinan melayani tidak hanya tertulis di dalam motonya saja, namun aplikasinya juga dapat dilihat dari gaya kepemimpinannya yang suka melakukan blusukan atau turun lapangan menemui masyarakat secara langsung, menanyakan keluhan kesah dan aspirasi masyarakat terhadap program kerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Kegiatan kunjungan langsung kepada masyarakat dilakukan melalui program Jumat keliling. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori kepemimpinan transformasional, karena peneliti melihat kepedulian Mahyeldi terhadap proses peningkatan kinerja pegawai pemerintah Kota Padang yang dilakukan melalui penanaman nilai-nilai spiritual untuk memotivasi dalam kegiatan dakwah, sehingga mampu memberikan perubahan

---

<sup>17</sup>J. Kaloh, 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah. (Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43.

positif kepada bawahan untuk peningkatan pelayanan publik dan pembangunan di Kota Padang yang lebih baik yang dibuktikan dengan telah sukses meraih berbagai penghargaan dan prestasi. Proses peningkatan kinerja pegawai tentunya tidak lepas dari peranan seorang pemimpin. Hal ini dilakukan Mahyeldi melalui proses transformasi nilai-nilai spiritual kepada bawahannya di jajaran pemerintah Kota Padang.

Gaya kepemimpinan melayani (*servant leadership*) dan gaya kepemimpinan transformasional (*transformational leadership*) dipandang mampu menjawab tantangan di era globalisasi. Melalui konsep kepemimpinan melayani, pemimpin mampu memengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk senantiasa memiliki tanggung jawab yang besar atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan, memiliki dedikasi, loyalitas, dan integritas yang baik dalam mencapai tujuan organisasi. Demikian pula dengan kepemimpinan transformasional, pemimpin dapat mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk mengubah lingkungan kerja, memiliki semangat dan motivasi, memiliki pola dan nilai-nilai kerja dalam mencapai tujuan organisasi.

Pembangunan dan prestasi yang telah diraih Kota Padang tentunya tidak dapat dicapai dengan cara yang begitu mudah. Butuh proses, usaha dan kerja keras dalam mencapai hal itu, terutama peranan seorang pemimpin dalam menata, mengelola serta memimpin pegawai, agar setiap program kerja yang akan direalisasikan dapat berjalan secara optimal. Hal ini dilakukan Mahyeldi melalui gaya kepemimpinannya dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai Walikota Padang periode 2014-2019, sehingga Kota Padang sukses meraih prestasi dan penghargaan dari berbagai sektor pemerintahan. Mahyeldi sebagai salah satu pemimpin politik, dimana Kota Padang meraih berbagai prestasi dan penghargaan di masa kepemimpinan Mahyeldi sebagai Walikota, tentu tidak terjadi begitu saja, tetapi juga ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kepemimpinan politiknya, hal ini memunculkan rasa ingin tahu peneliti terhadap seperti apa bentuk gaya kepemimpinan politik yang diterapkannya dalam mengelola, mengendalikan dan memberdayakan pegawai pemerintahan Kota

Padang agar mendukung setiap program kebijakan yang tertuang dalam visi pembangunan Mahyeldi sebagai Walikota periode 2014-2019 dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan politiknya baik secara internal maupun eksternal. Hal inilah yang dikaji secara lebih dalam melalui penelitian yang telah dilakukan. Dari penjelasan yang telah disampaikan, maka yang menjadi pertanyaannya adalah **Bagaimana bentuk gaya kepemimpinan politik yang diterapkan Mahyeldi Ansharullah sebagai Walikota Padang periode 2014-2019 dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinannya tersebut?**

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan politik Mahyeldi Ansharullah sebagai Walikota Padang periode 2014-2019 dengan mencari tau bentuk gaya kepemimpinan politik yang diterapkannya sebagai kepala daerah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan politiknya tersebut. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan teori kepemimpinan politik yang diterapkan kepala daerah di Indonesia, khususnya Walikota Padang yang dilihat dari dua konsep kepemimpinan yaitu kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan melayani.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap kajian kepemimpinan politik kepala daerah, sehingga dapat dijadikan sebagai kerangka acuan konseptual ilmiah bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan khasanah Ilmu Politik. Dalam penelitian ini peneliti mengkombinasikan dua konsep kepemimpinan yaitu kepemimpinan

transformatif dan kepemimpinan melayani dalam menganalisis gaya kepemimpinan Mahyeldi Ansharullah, oleh sebab itu hasil penelitian ini diharapkan mampu menemukan sebuah gaya kepemimpinan yang ideal yaitu kepemimpinan transformatif melayani sebagai gaya kepemimpinan yang ideal dan efektif untuk diterapkan kepala daerah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah kearah yang lebih maju. Manfaat lain dari penelitian ini yaitu, secara praktis diharapkan mampu memberikan masukan bagi kepala daerah agar memiliki gaya kepemimpinan yang sesuai dengan harapan masyarakat untuk membangun dan memajukan daerah.

